

TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL DI DINAS SOSIAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



DI SUSUN OLEH :

ANJELI

21011702

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA MANAJEMEN
SEKOLAH TINGGI ILMU BISNIS KUMALA NUSA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Program Jaminan Sosial Di Dinas Sosial
Daerah Istimewah Yogyakarta

Nama : Anjeli

Nim : 21011702

Program Studi : Manajemen

Tugas Akhir ini telah di setujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Program Studi Diploma Tiga Manajemen STIB Kumala Nusa pada :

Hari :

Tanggal :

Mengetahui

Dosen Pembimbing



Nindyah Pratiwi, S.pd., M.Hum
NIK. 11700119

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL DI DINAS SOSIAL
DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA

Laporan Tugas Akhir ini telah di ajukan pada Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa untuk memenuhi persyaratan akhir Pendidikan pada Program Studi Diploma tiga Manajemen :

Disetujui dan di Sahkan Pada :

Hari :

Tanggal :

Tim Penguji

Ketua

Anggota

.....

.....

Mengetahui
Ketua STIB Kumala Nusa

Anung Pramodyo, S.E., M.M
NIP. 19780204 200501 1 002

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangandi bawah ini :

Nama : Anjeli

NIM : 21011702

Judul Tugas Akhir : Implementasi Program Jaminan Sosial Dinas Sosial
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diterbitkan oleh pihak manapun kecuali tersebut dalam referensi dan bukan merupakan hasil karya orang lain sebagian maupun secara keseluruhan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar–benarnya. Apabila dikemudian hari ada yang mengklaim bahwa karya ini milik orang lain dan dibenarkan secara hukum, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum.

Yogyakarta, 2024

Yang membuat pernyataan



Anjeli

MOTTO

"Langkahku ditetapkan oleh TUHAN, dan Ia berkenan pada jalanku. Sekalipun aku jatuh, aku tidak akan tergeletak, sebab TUHAN menopang tanganku."

Mazmur 37:23-24.

HALAMAN PESEMBAHAN

Dengan sembah sujud syukur yang terdalam, Penulis persembahkan kepada :

1. Yang Mahakuasa Tuhan Yesus Kristus. Atas kasih karunia, rahmat, dan penyertaan-Nya yang tiada henti, saya diberi kekuatan, ketabahan, dan hikmat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bunda Maria, Sebagai Bunda Gereja dan Bunda kami semua. Karya ini adalah hasil dari usaha dan doa. Meskipun masih jauh dari sempurna, saya persembahkan sebagai tanda kasih dan devosi saya kepada Bunda.
3. Kedua orang tua, Mas Eko dan Kak Maria yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materi serta do'a yang tiada hentinya.
4. Bapak Anung Pramodyo, S.E., M.M Selaku Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa.
5. Ibu Nindyah Pratiwi, S.Pd.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Penulis
6. Bapak dan Ibu Dosen STIB Kumala Nusa yang senantiasa memberikan Ilmu kepada Penulis.
7. Saudara dan temen-temen Seperjuangan yang senantiasa selalu Mendorong dan Memotivasi Penulis.
8. Ratnama Anakya Cetta Susanto Dan Mas Loys yang senantiasa Menemani Saya setiap Hari.
9. Keluarga Besar Bapak Marsianus Pijar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan Judul “Implementasi Program Jaminan Sosial di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Tugas Akhir merupakan satu kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk mencapai derajat Ahli Madya Manajemen Pada Program Studi Diploma III Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Anung Pramodyo, S.E., M.M Selaku Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa.
2. Ibu Nindyah Pratiwi, S.Pd.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Penulis
3. Bapak dan Ibu Dosen STIB Kumala Nusa yang senantiasa memberikan Ilmu kepada Penulis.
4. Semua Pihak yang telah mendukung, memotivasi dan mendoakan Penulis.

Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan sumbangan untuk
pengembangkan Ilmu dan pengetahuan bagi setiap pembaca.

Yogyakarta, 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anjeli', written in a cursive style.

Anjeli

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN PERNYATAAN	IV
HALAMAN MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XII
ABSTRAK	XIII
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	3
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. MANFAAT PENELITIAN	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. LANDASAN TEORI.....	6
B. KONSEP JAMINAN SOSIAL	10
C. DINAS SOSIAL	13
BAB III METODE PENELITIAN	

A. JENIS PENELITIAN	15
B. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN	18
C. JENIS DATA	19
D. METODE PENGUMPULAN DATA.....	19
E. METODE ANALISIS DATA.....	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. GAMBARAN UMUM.....	26
B. HASIL PENELITIAN	28
C. PEMBAHASAN.....	42
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	47
B. SARAN.....	47
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Tabel Personalia.....	40
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Foto Kegiatan Penelitian

Lampiran 2 : Foto Bersama Pembimbing Lapangan

ABSTRAK

Jaminan sosial merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dinas Sosial DIY sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi langsung di Kantor Dinas sosial DIY .

Data dikumpulkan melalui Wawancara, observasi dan dokumentasi. program jaminan sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial DIY. Program-program tersebut seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Sosial (BANSOS) Dan Rehabilitasi Sosial.

Kata Kunci : Implementasi, Program Jaminan Sosial, Dinas Sosial

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengimplementasikan berbagai program jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi program-program tersebut. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman akan manfaat program, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial di DIY juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi program jaminan sosial. Selain itu, adanya perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, seperti pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, dan perubahan struktur demografi, juga menuntut adanya penyesuaian dalam implementasi program-program jaminan sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program jaminan sosial di DIY. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah tersebut dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas program-program jaminan sosial di DIY.

Program jaminan sosial merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pemerintah untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Di Indonesia, program jaminan sosial telah menjadi fokus utama dalam

kebijakan pembangunan sosial guna mengatasi berbagai risiko sosial yang dihadapi oleh masyarakat, seperti risiko kehilangan pendapatan, sakit, cacat, dan meninggal dunia.

Dalam konteks otonomi daerah, implementasi program jaminan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam beberapa tahun terakhir, Dinas Sosial DIY telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan jaminan sosial bagi masyarakat.

Namun, hingga saat ini masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasi program jaminan sosial di DIY yang perlu diidentifikasi dan diatasi secara komprehensif. kendala dalam pelaksanaan program-program tersebut, seperti:

1. Keterbatasan anggaran: Anggaran yang tersedia untuk program jaminan sosial masih terbatas, sehingga tidak semua masyarakat yang membutuhkan dapat terlayani.
2. Pendataan yang belum optimal: Pendataan masyarakat miskin dan rentan masih belum optimal, sehingga masih ada masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan.
3. Kurangnya koordinasi: Koordinasi antara berbagai lembaga penyelenggara program jaminan sosial masih perlu ditingkatkan

Sedangkan Jaminan sosial adalah program yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap risiko sosial dan ekonomi. Di Indonesia, program jaminan sosial diselenggarakan oleh berbagai lembaga, termasuk

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga swasta. Program ini diselenggarakan oleh berbagai lembaga, antara lain:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
2. BPJS Ketenagakerjaan
3. Kementerian Sosial

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), program jaminan sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial DIY. Program-program tersebut meliputi:

1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Program ini memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia, termasuk penduduk DIY.
2. Bantuan Sosial (Bansos): Program ini memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
3. Rehabilitasi Sosial: Program ini membantu masyarakat yang mengalami masalah sosial, seperti anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
4. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Sosial (BANSOS) Dan Rehabilitasi Sosial

Program-program jaminan sosial tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana implementasi program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY?

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diperoleh penulis dalam penulisan Tugas akhir ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa terutama pada bidang jaminan sosial.
 - b. Membangun jaringan dengan bertemu berbagai orang di dalam lingkungan tempat Penelitian.
 - c. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri secara profesional.
 - d. Mahasiswa dapat mengaplikasikan Ilmu yang dapat dipergunakan.
2. Bagi Dinas sosial Daerah istimewa Yogyakarta
Memberikan masukan kepada Dinas Sosial DIY untuk meningkatkan implementasi program jaminan sosial.
3. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa Yogyakarta
 - a. Menjadi masukan untuk mengevaluasi sejauh mana mahasiswa memahami materi apa saja yang di dapatkan dipergunakan.
 - b. Menerapkan Pengalaman yang telah di peroleh di perkuliahan.
 - c. Mendapatkan masukan yang berguna untuk menyempurnakan Kurikulum yang sesuai dengan program Kampus Merdeka.

4. Bagi Masyarakat
 - a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
 - b. Mewujudkan Keadilan Sosial dan Pemerataan Kesejahteraan.
 - c. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.
 - d. Meningkatkan Produktivitas dan daya saing tenaga kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Konsep Implementasi kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah tahap krusial dalam keberhasilan sebuah program atau kebijakan. Hill dan Hupe (2009) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan melibatkan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menerjemahkan keputusan kebijakan menjadi tindakan konkret yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Teori implementasi kebijakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) menyebutkan bahwa faktor-faktor seperti karakteristik kebijakan, karakteristik organisasi, dan karakteristik masyarakat mempengaruhi implementasi kebijakan. Teori ini menyoroti pentingnya memperhatikan konteks dan dinamika sosial dalam proses implementasi.

Partisipasi masyarakat dianggap sebagai faktor kunci dalam keberhasilan implementasi program jaminan sosial. Menurut Soekanto (2019) partisipasi masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap program, sehingga meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program.

Penyuluhan dan sosialisasi program jaminan sosial menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program yang ada. Penyuluhan yang efektif dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat

tentang manfaat dan mekanisme program, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan efektivitas program (Soekanto, 2019).

Koordinasi antar instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan BPJS Kesehatan, juga merupakan faktor penting dalam implementasi program jaminan sosial. Koordinasi yang baik akan mempermudah pertukaran informasi dan koordinasi antarprogram, sehingga meningkatkan efektivitas implementasi program (Van Meter & Van Horn, 1975).

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi manajemen, dapat mempermudah pelaporan, monitoring, dan evaluasi program. Teknologi informasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi program jaminan sosial (Soekanto, 2019).

Evaluasi dan monitoring rutin terhadap program-program jaminan sosial sangatlah penting. Evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan akan membantu dalam mengidentifikasi masalah secara dini dan meningkatkan responsibilitas program (Van Meter & Van Horn, 1975).

Dari beberapa teori para Ahli di atas maka dapat disimpulkan pendapat bahwa implementasi kebijakan publik, khususnya dalam program jaminan sosial, merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi karakteristik kebijakan, organisasi, dan masyarakat yang mempengaruhi jalannya implementasi.

Partisipasi masyarakat, penyuluhan, koordinasi antar instansi, pemanfaatan teknologi informasi, serta evaluasi dan monitoring program merupakan hal-hal

penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan sosial.

Dengan memperhatikan semua faktor ini, diharapkan implementasi program jaminan sosial dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

2. Konsep Implementasi Program

a. Pengertian Implementasi Program

Menurut George C. Edwards III (1980) menyatakan Implementasi Program adalah proses bagaimana program-program pemerintah dijalankan atau di terapkan. Implementasi Program adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pemerintah, individu-individu, dan sektor-sektor masyarakat lainnya, yang diarahkan untuk menerapkan kebijakan yang telah diadopsi. (Hill, M., & Hupe, P. 2009).

Berdasarkan Pendapat beberapa para ahli di atas dapat di tarik kesimpulannya bahwa Implementasi program adalah suatu proses penerapan kebijakan yang kompleks dan multidimensional yang melibatkan berbagai aktor dan faktor. Implementasi tidak hanya sebatas pada pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga termasuk pada proses pembuatan kebijakan, perumusan strategi, dan pengalokasian sumber daya.

Implementasi program merujuk pada proses menjalankan dan melaksanakan program atau kebijakan yang telah dirancang. Proses ini mencakup langkah-langkah konkret atau nyata untuk menerapkan program tersebut, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut beberapa para Ahli ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Antara lain :

1). Kejelasan tujuan dan sasaran.

Tujuan dan sasaran yang jelas akan memudahkan para pelaksana untuk memahami apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. (Van Meter dan Van Horn 1975).

2). Dukungan politik.

Dukungan dari para pemimpin politik dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. (Mazmanian dan Sabatier 1981).

3). Ketersediaan sumber daya

Implementasi kebijakan membutuhkan sumber daya yang memadai, seperti dana, tenaga kerja, dan peralatan. Edward III 1980).

4). Kapasitas kelembagaan

Menurut George C. Edwards III (198) Lembaga yang bertanggung jawab untuk implementasi kebijakan harus memiliki kapasitas yang memadai, seperti struktur organisasi yang jelas, staf yang kompeten, dan sistem yang efektif.

5). Komunikasi dan koordinasi

Komunikasi dan koordinasi yang baik antara berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan sangat penting untuk memastikan

bahwa semua orang bekerja sama dan menuju ke arah yang sama. George C. Edwards III 1980).

6). Kepemimpinan

Menurut Hogwood dan Gunn (1984) menyatakan Kepemimpinan yang kuat dan efektif dari para pemimpin politik dan administrator sangat penting untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan berjalan dengan lancar.

7). Budaya organisasi

Budaya organisasi yang mendukung implementasi kebijakan akan membantu para pelaksana untuk bekerja dengan lebih efektif. (Pressman dan Wildavsky 1973).

8). Faktor eksternal

Faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi dan politik, juga dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Bardach (1977).

B. KONSEP JAMINAN SOSIAL

1. Definisi Jaminan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jaminan sosial adalah jaminan yang diberikan oleh negara kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan dalam bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepesertaan program jaminan sosial lainnya.

Jaminan sosial adalah suatu program atau sistem yang memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, terutama dalam hal kesehatan, ketenagakerjaan, dan kecelakaan. “jaminan sosial memiliki tiga fungsi utama, yaitu proteksi, pencegahan, dan promosi kesejahteraan sosial. Soekanto, S. (2010).

Sedangkan Secara umum, jaminan sosial dapat diartikan sebagai sistem perlindungan sosial yang disediakan oleh negara atau lembaga lainnya untuk memberikan perlindungan finansial atau non-finansial kepada individu atau keluarga yang memerlukan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketidak pastian ekonomi.

2. Sejarah dan Perkembangan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia

Menurut (Setiawan, B., & Usman, S. (2017) Sistem Jaminan Sosial (SJS) di Indonesia memiliki sejarah panjang dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Berikut adalah beberapa periode penting dalam perkembangan SJS di Indonesia.

Pada awal Tahun 1900-an Lahirnya berbagai badan usaha sosial dan dana pensiun swasta untuk membantu pekerja. Tahun 1933 Didirikannya Sociale Verzekeringsbank (SVB) oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan jaminan sosial kepada pegawai negeri.

Pada awal Kemerdekaan Tahun 1945-1960 Berbagai upaya dilakukan untuk membangun Sistem Jaminan Sosial, namun belum terstruktur dan terkoordinasi dengan baik.

Dan pada Tahun 1960-1990 Didirikannya beberapa program jaminan sosial, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk pekerja di sektor formal. Krisis ekonomi mendorong pemerintah untuk merumuskan SJS yang lebih komprehensif pada tahun 1998.

Pada Periode Reformasi Tahun 2004 Disahkannya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai landasan hukum SJS di Indonesia.

Dan Tahun 2011 Didirikannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, untuk mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Tahun 2014 JKN mulai berlaku secara nasional. Saat ini Sistem Jaminan Sosial di Indonesia terus berkembang dengan cakupan kepesertaan yang semakin luas dan manfaat yang semakin beragam.

3. Peraturan Perundang-undangan tentang Jaminan Sosial

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Sistem Jaminan Sosial di Indonesia.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Mengamanatkan negara untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya.
- 2) UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN: Menetapkan kerangka dasar SJS di Indonesia, termasuk tujuan, asas, dan penyelenggaraannya.

- 3) UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS: Menetapkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara program JKN dan Jamsostek.
 - 4) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden: Mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan program JKN dan Jamsostek.
4. Evaluasi Implementasi Program Jaminan Sosial

Evaluasi implementasi program jaminan sosial penting dilakukan untuk mengevaluasi keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti studi kasus, survei, dan analisis statistik. (Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. 2004).

Evaluasi program jaminan sosial perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan efektivitas program. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Mengukur tingkat kepuasan peserta program.
- 2) Melakukan analisis terhadap data penyaluran manfaat.
- 3) Membandingkan hasil program dengan target yang telah ditetapkan.

Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki program dan meningkatkan kinerjanya.

C. DINAS SOSIAL

Menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan

kesejahteraan sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota.

Dinas Sosial adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan dan program di bidang kesejahteraan sosial. Soetomo (2008).

Dinas Sosial adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan dan program di bidang kesejahteraan sosial.

Menurut Soetjipto (2010) Dinas Sosial adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan pengertian dari para Ahli di atas maka dapat di simpulkan bahwa Dinas Sosial Merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan dan program di bidang kesejahteraan sosial dan pemberi pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan atau perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Berdasarkan pada masalah yang di teliti, maka Jenis metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah studi deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Adapun yang di maksud dengan Penelitian Deskriptif adalah suatu metode yang di lakukan untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan sekarang atau sedang berlangsung.

Menurut Sugiono (Naharoh, 2008:50) Metode penelitian adalah cara Ilmiah untuk mendapatkan data data dengan tujuan tertentu.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui deskripsi tentang kegunaan program jaminan sosial yang di laksanakan oleh dinas sosial daerah istimewa yogyakarta, Maka Metode penelitian yang akan di terapkan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif.

1. Metode Deskriptif

Metode penelitian merupakan suatu cara ataupun teknik yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data serta menganalisisnya agar diperoleh suatu kesimpulan guna mencapaitujuan penelitian.

Metode penelitian adalah upaya untuk mencari kebenaran secara ilmiah yang didasarkan pada yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Disamping itu untuk memperoleh kebenaran ilmiah, metode penelitian juga merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian secara efektif.

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung.

2. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni pendekatan penelitian yang menjawab permasalahan penelitiannya, memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai obyek yang diteliti, untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan penelitian dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan.

Model kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti apa kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive.

Menurut (Bogdan & Moleong, Lexy J, 2009:5) bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

(Davis Williams & Moleong, Lexy J, 2009:6) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti secara alamiah.

(Denzin dan Lincoln & Moleong, Lexy J, 2009:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Selanjutnya Moleong, Lexy J (2009:6) mensintesis Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. ,secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Miles dan Huberman (1994) kajian kualitatif mempunyai kualiti tidak dapat dinafikan karena mempunyai kata konkrit lebih dari satu dan dengan jelas lebih meyakinkan pembaca dari pada halaman-halaman bernomor.

B. WAKTU DAN TEMPAT

1. Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan Penelitian ini adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan atau fokus penelitian. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama 1 bulan dari tanggal 19 Februari sampai dengan 15 Maret 2024.

Waktu pelaksanaan di bidang jaminan sosial Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari hari senin sampai dengan hari jumat setiap minggunya pada jam kerja. Jam kerja di dinas sosial DIY, sebagai berikut:

- a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis Mulai dari jam 07:30-16:00 WIB.
- b. Hari Jumat mulai dari pukul 07:30 – 14:30 WIB
- c. Selama bulan suci Ramadhan hari Senin sampai dengan Kamis mulai jam 07:30 – 15.15 WIB.
- d. Selama bulan suci Ramadhan hari Jumat mulai dari pukul 07:30 – 11.00WIB

2. Tempat pelaksanaan

Penulis melaksanakan Penelitian ini di bidang Jaminan Sosial Dinas Sosial Daerah Istimewah Yogyakarta
Alamat: Jl. Janti, Kecamatan Banguntapan, Modalan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewah Yogyakarta, 55198.

C. JENIS DATA

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2009: 194) data primer adalah “sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, Misalnya data yang di pilih oleh responden melalui Kuesioner atau data hasil wawancara dengan Sumber.

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data Primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama. Data Primer penelitian di kumpulkan langsung dari sumber utama melalui penelitian Lapangan berupa wawancara dengan petugas DINSOS, penerima manfaat program, dan observasi langsung di lapangan.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2009: 194) data Sekunder adalah Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengmpulan data. Misalnya dokumen resmi Dinas Sosial, Laporan program, dan studi terdahulu terkait.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Tahapan penting dalam penelitian ini adalah pengumpulan data. Menurut Dja'an Sotori dan Aan Komariah (2009 : 103) mengumpulkan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.

Teknik pengumpulan data merupakan satu langkah garis besar dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data., tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian ini tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik wawancara, teknik observasi dan teknik studi dokumen.

1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan responden peneliti. Tanya jawab yang dilakukan bertujuan untuk mengambil keterangan, informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui proses komunikasi secara langsung dengan sumber-sumber data. Komunikasi yang dilakukan dalam bentuk dialog secara lisan atau sering disebut metode tanya jawab dengan sumber data penelitian.

Berg (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009:12) menyatakan wawancara sebagai suatu percakapan dengan suatu tujuan, khususnya tujuan untuk mengumpulkan informasi.

Sudjana (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009:130) wawancara adalah "proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya dengan pihak yang ditanya atau penjawab.

2. Observasi

Syaodin N (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009:105) menyatakan bahwa: "observasi (observation) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung”.

Sanafiah Faisal (1990) mengklasifikasikan observasi menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Observasi Partisipatif

Merupakan observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumberdata penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan sukanya. Dalam observasi partisipatif ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui padang tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

Dalam observasi ini peneliti terlibat, peneliti juga tidak terungkap atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

b. Observasi Tidak Terstruktur

Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan teknik observasi terus terang dan tersamar sebagai pendukung teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Ini didasarkan karena observasi yang dilakukan peneliti telah melalui perijinan terlebih dahulu serta rencana sehingga sumber data mengetahui pengamatan yang dilakukan oleh peneliti namun peneliti juga akan memastikan atau mengecek apakah hasil wawancara itu benar adanya.

3. Studi Dokumentasi

Sugiyono (2007) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh studi dokumen yang sah. Dalam penelitian studi dokumen akan mendukung hasil dari wawancara dan observasi.

Jadi ketiga teknik pengumpulan data ini akan saling melengkapi dan mendukung, oleh karena itu peneliti memakai teknik wawancara, observasi dan studi dokumen pengumpulan data.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses mengorganisir, mengelompokkan, menginterpretasi, dan menyajikan data yang telah dikumpulkan dalam rangka memahami fenomena yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian merupakan salah satu langkah yang penting dan sangat menentukan.

Analisis data adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan sehingga di peroleh temuan berdasarkan fokus atau rumusan masalah yang ingin di jawab.

Sugiono (2007) mengemukakan bahwa Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pelajari oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama tahapan analisis data selama proses dilangan bersamaan dengan proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data. Analisis ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi program jaminan sosial berlangsung di Dinas Sosial DIY. Adapun Pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Tampilan/Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Kesimpulan / Verifikasi (Kesimpulan / Verifikasi)

Langkah Ketiga Dalam Analisis Bisnis Kualita Menguruh Miles dan Huberman Adalah Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi. Kesimpulan Yang Diibat Oleh Penelitian Sabuni Dembuky Oleh Bukti-Bukti Yang Masih berlaku dan onsons Maka kesimpulan Yang dikemukakan merupakan kesimpulan Yang Kredibel.

Ketiga Tahap Kegiatan Analisis Ini Saling Berhubungan Satu Satu Dengan Yang Lain Dan Berlangsung Secara Kontinue Selama Penelitian Dilakukan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah Dinas Sosial DIY

Dinas Sosial DIY yang pada awalnya bernama Dinas Sosial Provinsi DIY berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun latar belakang pembentukan dinas ini adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Cakupan kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Dinas Sosial DIY meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dinas Sosial DIY dibentuk dengan tujuan membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

2. Visi Misi, Tujuan Dan Motto Dinas Sosial.

- a. Visi : “ Mewujudkan Kemandirian Dan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)Yang Berkarakter Dan Berbudaya” Dalam Upaya Mendukung Visi

Gubernur Diy Periode 2017-2022 Yaitu “ Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

b. Misi :

- 1) Menyelenggarakan Rehabilitasi,perlindungan pemberdayaan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) Agar berdaya dan berfungsi sosial sertameningkatkan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin
- 2) Mengembangkan potensisumber kesejahteraan sosial (psks) dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan menanamkan rasa nasionalisme, kesetiakawanan dan restorasi sosial

c. Tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi PMKS guna memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian (misi 1)
- 2) Meningkatkan kapasitas dan partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial (misi 2)

d. Motto : “ Melayani Dengan Hati, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Untuk Masyarakat Yogyakarta Yang Sejahtera, Mandiri Dan Bermartabat”

B. HASIL PENELITIAN

1. Program Jaminan Sosial di Dinas Sosial DIY

Program jaminan sosial di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencakup berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Beberapa program, Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan, bantuan pakaian, dan bantuan lainnya.

Bantuan ini diberikan secara teratur atau dalam situasi khusus, seperti dalam kondisi bencana alam atau pandemi.

a. Program Jaminan Kesehatan

Program ini menyediakan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdaftar. Program jaminan kesehatan dapat mencakup biaya pemeriksaan medis, obat-obatan, dan perawatan di rumah sakit.

b. Program Jaminan Sosial Lainnya

Selain program bantuan sosial dan jaminan kesehatan, Dinas Sosial DIY juga menyelenggarakan program-program jaminan sosial lainnya, seperti program jaminan pensiun bagi pekerja formal, program perlindungan sosial bagi anak-anak dan lansia, serta program-program lain yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Program-program ini dirancang untuk mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti

pangan, sandang, dan papan, hingga akses terhadap pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial. Dengan adanya program-program ini, diharapkan kesejahteraan sosial masyarakat DIY dapat terus meningkat.

2. Implementasi Program Jaminan Sosial Di Dinas Sosial DIY

Dinas Sosial DIY Sebagai daerah otonom, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kebijakan sendiri dalam mengelola program jaminan sosial. Evaluasi terhadap implementasi program jaminan sosial di DIY dapat memberikan gambaran tentang efektivitas dan efisiensi program tersebut. Dinas Sosial DIY telah melaksanakan berbagai program jaminan sosial di wilayah DIY, antara lain:

a. Bantuan Sosial (Bansos)

1) Jenis bantuan:

- a) Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- b) Program Keluarga Harapan (PKH)
- c) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- d) Bantuan Stimulan Program Keluarga Harapan (BST PKH)
- e) Bantuan Sosial Tunai (BST)
- f) Bantuan Modal Usaha (BMU)

2) Cara mengimplementasikan Program Bantuan Sosial

sebagai berikut :

- a) Penentuan sasaran penerima manfaat dilakukan melalui pendataan dan verifikasi oleh Dinas Sosial DIY dan instansi terkait.
 - b) Penyaluran bantuan dilakukan melalui transfer bank, penyaluran langsung, atau melalui agen penyalur resmi.
 - c) Penerima manfaat diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, seperti penggunaan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengikuti kegiatan pendampingan.
- b. Bantuan Kesehatan
- 1) Jenis bantuan:
 - a) Kartu Indonesia Sehat (KIS)
 - b) Kartu Lansia Terlantar (KLT)
 - c) Bantuan Penguatan Jaminan Kesehatan (BPJK)
 - d) Bantuan Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas (BJKPD)
 - 2) Cara mengimplementasikan Program Bantuan Kesehatan sebagai berikut:
 - a) Penerima manfaat bantuan kesehatan didaftarkan ke program JKN-KIS melalui Dinas Sosial DIY dan instansi terkait.

- b) Penerima manfaat dapat memanfaatkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
- c) Dinas Sosial DIY melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan kesehatan.

c. Bantuan Rehabilitasi Sosial

1) Jenis bantuan:

- a) Rehabilitasi sosial dasar
- b) Rehabilitasi sosial lanjutan
- c) Asistensi sosial
- d) Bantuan alat bantu rehabilitasi

2) Cara mengimplementasikan program bantuan rehabilitasi sosial sebagai berikut:

- a) Penerima manfaat bantuan rehabilitasi sosial diidentifikasi melalui pendataan dan verifikasi oleh Dinas Sosial DIY dan instansi terkait.
- b) Bantuan rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk layanan, barang, atau uang.
- c) Penerima manfaat diwajibkan untuk mengikuti proses rehabilitasi sosial yang sesuai dengan kebutuhannya.

d. Bantuan Perlindungan Anak

1) Jenis bantuan:

- a) Penguatan keluarga
- b) Pencegahan dan penanganan anak terlantar
- c) Rehabilitasi sosial anak terlantar
- d) Asistensi sosial anak terlantar

2) Cara mengimplementasikan Bantuan Perlindungan Anak

sebagai berikut:

- a) Penerima manfaat bantuan perlindungan anak diidentifikasi melalui pendataan dan verifikasi oleh Dinas Sosial DIY dan instansi terkait.
- b) Bantuan perlindungan anak diberikan dalam bentuk layanan, barang, atau uang.
- c) Dinas Sosial DIY melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perlindungan anak.

e. Bantuan Perlindungan Lansia

1) Jenis bantuan:

- a) Bantuan sosial lansia
- b) Rehabilitasi sosial lansia
- c) Asistensi sosial lansia

2) Cara mengimplementasikan Bantuan Perlindungan Lansia

sebagai berikut:

- a) Penerima manfaat bantuan perlindungan lansia diidentifikasi melalui pendataan dan verifikasi oleh Dinas Sosial DIY dan instansi terkait.
 - b) Bantuan perlindungan lansia diberikan dalam bentuk layanan, barang, atau uang.
 - c) Dinas Sosial DIY melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perlindungan lansia.
- f. Bantuan Perlindungan Penyandang Disabilitas
- 1) Jenis bantuan:
 - a) Asistensi sosial penyandang disabilitas
 - b) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
 - c) Bantuan alat bantu rehabilitasi
 - 2) Cara mengimplementasikan Bantuan Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagai berikut:
 - a) Penerima manfaat bantuan perlindungan penyandang disabilitas diidentifikasi melalui pendataan dan verifikasi oleh Dinas Sosial DIY dan instansi terkait.
 - b) Bantuan perlindungan penyandang disabilitas diberikan dalam bentuk layanan, barang, atau uang.

- c) Dinas Sosial DIY melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perlindungan penyandang disabilitas.

g. Bantuan Bencana

1) Jenis bantuan:

- a) Bantuan logistik
- b) Bantuan keuangan
- c) Bantuan pemulihan sosial

2) Cara mengimplementasikan program Bantuan Bencana

sebagai berikut :

- a) Bantuan bencana diberikan kepada korban bencana alam atau sosial melalui koordinasi dengan instansi terkait.
- b) Bantuan bencana diberikan dalam bentuk logistik, keuangan, atau pemulihan sosial.
- c) Dinas Sosial DIY melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan bencana.

3. Peran Dinas Sosial dalam Implementasi Program Jaminan Sosial

a. Peran Dinas Sosial dalam Sistem Jaminan Sosial

Dinas Sosial memiliki peran penting dalam implementasi sistem jaminan sosial. Mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan peserta jaminan sosial, mengelola data peserta, serta

menyediakan layanan sosial bagi peserta yang membutuhkan (Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. 2015)

Dinas Sosial memiliki peran penting dalam implementasi program jaminan sosial, yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan: Dinas Sosial berperan dalam merumuskan kebijakan jaminan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - 2) Sosialisasi dan edukasi: Dinas Sosial bertanggung jawab untuk mensosialisasikan program jaminan sosial kepada masyarakat dan memberikan edukasi tentang pentingnya jaminan sosial.
 - 3) Pendaftaran dan verifikasi peserta: Dinas Sosial membantu masyarakat dalam proses pendaftaran dan verifikasi sebagai peserta program jaminan sosial.
 - 4) Penyaluran manfaat: Dinas Sosial bertugas untuk menyalurkan manfaat program jaminan sosial kepada peserta yang berhak.
 - 5) Monitoring dan evaluasi: Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program jaminan sosial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program.
- b. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Sosial . Ada beberapa tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam pelaksanaan program jaminan sosial:

- 1). Melakukan pendataan dan verifikasi terhadap calon peserta program.
- 2). Menyalurkan bantuan sosial kepada peserta program.
- 3). Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
- 4). Memberikan advokasi dan fasilitasi kepada peserta program.
- 5). Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan program jaminan sosial

c. Manfaat Program Jaminan Sosial di Dinas Sosial DIY

- 1) Peningkatan Akses: Penelitian menemukan peningkatan jumlah penerima manfaat program jaminan sosial di DIY. Program seperti Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berhasil menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
- 2) Kualitas Hidup Lebih Baik: Penerima manfaat yang diwawancarai menyatakan bahwa program jaminan sosial membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan kesehatan.
- 3) Akses terhadap pendidikan juga meningkat, terutama pada anak-anak dari keluarga prasejahtera.
- 4) Koordinasi Membaik: Hasil Sudi dokumen menunjukkan adanya peningkatan koordinasi antara Dinas Sosial DIY dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Hal ini terlihat dari mekanisme rujukan yang lebih lancar bagi penerima manfaat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

d. Dampak program jaminan

Program jaminan sosial memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan. Dampak program jaminan sosial dapat dilihat dari dua aspek utama: ekonomi dan sosial.

1) Dampak Ekonomi:

a). Pengentasan Kemiskinan

- Jaminan sosial membantu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat miskin.
- Program seperti bantuan sosial dan jaminan kesehatan dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar.
- Peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dan peluang kerja, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

b). Pemberdayaan Masyarakat:

- Jaminan sosial memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih fokus untuk meningkatkan taraf hidup.
- Program seperti jaminan ketenagakerjaan dapat membantu pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau kehilangan pekerjaan untuk kembali bangkit dan produktif.

- Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

2) Dampak Sosial:

a) Perubahan Perilaku:

- Jaminan sosial dapat mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka.
- Program seperti jaminan kesehatan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan menjaga pola hidup sehat.
- Peningkatan akses terhadap pendidikan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka.

b) Peningkatan Kesejahteraan Sosial:

- Jaminan sosial dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan rasa keadilan sosial.
- Program seperti bantuan sosial dan jaminan pendidikan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan rentan.
- Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia masyarakat.

d. Tantangan Implementasi program jaminan sosial

Implementasi program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY dihadapkan pada beberapa tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan program-program jaminan sosial yang ada. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dalam program jaminan sosial masih rendah di kalangan masyarakat DIY, terutama di daerah pedesaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ahmad (2020) yang menyatakan bahwa “kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan sosial masih rendah, terutama di daerah pedesaan”.

Pandangan lain dari Nurhayati (2018) menyatakan “bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme dan manfaat program jaminan sosial menyebabkan rendahnya partisipasi”. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses informasi, dan kesadaran akan hak-hak sosial juga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program-program jaminan sosial. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam penyuluhan dan sosialisasi program-program jaminan sosial.

Menurut Soekanto (2019), penyuluhan yang efektif dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang manfaat dan mekanisme program-program jaminan sosial, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan efektivitas program.

Dalam melaksanakan program jaminan sosial terdapat beberapa kendala yang di alami oleh Dinas sosial DIY/ Tim pelaksana antara lain :

1) Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk program jaminan sosial dirasa masih belum mencukupi. Hal ini berdampak pada cakupan penerima manfaat dan besaran bantuan yang diberikan.

2) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

Jumlah SDM yang menangani program jaminan sosial, khususnya di tingkat kelurahan dan desa, masih terbatas. Hal ini dapat menghambat proses pendaftaran, verifikasi, dan penyaluran bantuan secara efisien.

Tabel 4.1 Personalia/SDM Bidang Jaminan Sosial DIY

No	Jabatan	Jumlah SDM
1	Kepala Bidang	1 Orang
2	Jabatan Fungsional	1 Orang
3	Administrator	2 Orang
4	Pelaksana	6 Orang
Total		10 Orang

3) Kurangnya koordinasi antar-lembaga terkait.

Masyarakat masih ada yang belum mengetahui atau memahami program jaminan sosial yang tersedia. Optimalisasi sosialisasi menjadi penting untuk meningkatkan inklusifitas program.

e. Solusi dalam tantangan implementasi

Untuk meningkatkan implementasi program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar implementasi jaminan sosial lebih optimal.

1) Peningkatan Anggaran

- a) Menyarankan agar Dinas Sosial DIY mengusulkan anggaran yang memadai untuk mendukung program-program jaminan sosial.
- b) Menyebutkan bahwa anggaran yang memadai akan memungkinkan program-program jaminan sosial berjalan lebih lancar dan efektif.

2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

- a) Menyarankan pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi program jaminan sosial.
- b) Memaparkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi program.

3) Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Terkait

- a) Mengusulkan adanya forum koordinasi rutin antara Dinas Sosial DIY dengan instansi-instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
- b) Menyebutkan bahwa koordinasi yang baik akan mempermudah pertukaran informasi dan koordinasi antarprogram, sehingga meningkatkan efektivitas implementasi program.

4) Penggunaan Teknologi dan informasi

- a) Menyarankan pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi manajemen, untuk mempermudah pelaporan, monitoring, dan evaluasi program.
 - b) Mengemukakan bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi program.
- 5) Partisipasi masyarakat
- a) Mengusulkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program jaminan sosial.
 - b) Menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat akan memperkuat akar rumput program, sehingga meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas program.
- 6) Evaluasi dan monitoring
- a) Menyarankan adanya evaluasi dan monitoring rutin terhadap program-program jaminan sosial di DIY.
 - b) Memaparkan bahwa evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan akan membantu dalam mengidentifikasi masalah secara dini dan meningkatkan responsibilitas program.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di simpulkan bahwa program jaminan sosial telah mencakup beberapa program yang telah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Salah satu program utamanya adalah program bantuan sosial, yang mencakup bantuan tunai bagi keluarga miskin, bantuan pangan, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan.

Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial kepada keluarga yang membutuhkan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, Dinas Sosial DIY juga mengelola program jaminan kesehatan, yang memberikan akses layanan kesehatan yang terjangkau bagi masyarakat. Program ini mencakup pemberian kartu jaminan kesehatan kepada masyarakat yang memenuhi syarat, sehingga mereka dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus khawatir tentang biaya yang tinggi.

Program Jaminan Sosial lainnya yang dikelola oleh Dinas Sosial DIY termasuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha, serta program perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak terlantar, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.

Implementasi program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Berbagai program jaminan sosial telah dilaksanakan dengan baik, seperti program yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dinas Sosial DIY juga terlibat dalam koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program JKN dan Jamsostek. Selain itu, Dinas Sosial DIY juga aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang program jaminan sosial yang ada, serta membantu masyarakat dalam proses pendaftaran dan verifikasi sebagai peserta program.

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial DIY tidak hanya fokus pada pelaksanaan program, tetapi juga pada upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program jaminan sosial. Manfaat program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peningkatan akses menjadi salah satu hasil yang positif dari program ini. Dengan adanya program seperti ASPD dan BPNT, jumlah penerima manfaat yang berhasil dijangkau meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa program jaminan sosial telah berhasil menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, program jaminan sosial juga memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat. Melalui wawancara dengan penerima manfaat, diketahui bahwa program ini membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan kesehatan.

Peningkatan akses terhadap pendidikan juga terjadi, terutama pada anak-anak dari keluarga prasejahtera. Dengan demikian, program jaminan sosial telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain manfaat langsung bagi masyarakat, implementasi program jaminan sosial juga telah memperbaiki koordinasi antara Dinas Sosial DIY dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Hal ini terlihat dari mekanisme rujukan yang lebih lancar bagi penerima manfaat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Peningkatan koordinasi ini

merupakan langkah positif dalam memperbaiki pelayanan sosial bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, manfaat program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY sangatlah besar. Selain meningkatkan akses dan kualitas hidup masyarakat, program ini juga berhasil memperbaiki koordinasi antarinstansi terkait. Dengan demikian, program jaminan sosial telah memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat DIY.

Implementasi program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY menghadapi beberapa tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan program-program jaminan sosial yang ada.

Data menunjukkan tingkat partisipasi dalam program tersebut masih rendah, terutama di daerah pedesaan. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses informasi, dan kesadaran akan hak-hak sosial juga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program-program jaminan sosial.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam penyuluhan dan sosialisasi program-program jaminan sosial. Menurut Soekanto (2019) penyuluhan yang efektif dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang manfaat dan mekanisme program-program jaminan sosial, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan efektivitas program.

Dalam melaksanakan program jaminan sosial, Dinas Sosial DIY mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran yang

dialokasikan untuk program tersebut. Anggaran yang kurang memadai berdampak pada cakupan penerima manfaat dan besaran bantuan yang diberikan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang menangani program jaminan sosial, khususnya di tingkat kelurahan dan desa, juga masih terasa. Hal ini dapat menghambat proses pendaftaran, verifikasi, dan penyaluran bantuan secara efisien.

Kurangnya koordinasi antar-lembaga terkait juga menjadi kendala, di mana masih ada masyarakat yang belum mengetahui atau memahami program jaminan sosial yang tersedia.

Untuk mengatasi tantangan implementasi program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY, beberapa solusi telah diusulkan. Antara lain, peningkatan anggaran untuk mendukung program-program jaminan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi program, peningkatan koordinasi antar instansi terkait, penggunaan teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta evaluasi dan monitoring rutin terhadap program-program jaminan sosial.

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan implementasi program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY dapat menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY telah dilakukan dengan cukup baik, terutama dalam hal pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
2. Faktor-faktor seperti komitmen petugas, koordinasi antarinstansi, dan partisipasi masyarakat mempengaruhi keberhasilan implementasi program jaminan sosial.
3. Masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi program, seperti kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat dan belum optimalnya pengawasan terhadap program.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran untuk perbaikan implementasi program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY:

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antarinstansi terkait untuk memastikan program jaminan sosial dapat berjalan dengan lancar dan efisien.

2. Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya program jaminan sosial dan cara mengaksesnya.
3. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
4. Meningkatkan pengawasan terhadap program jaminan sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan.

Dengan melakukan perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan implementasi program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hill, M., & Hupe, P. (2009). Implementasi kebijakan publik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S. (2019). Partisipasi masyarakat dalam program jaminan sosial. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 2(1), 10-25.
- George C. Edwards III. (1980). Implementasi Program. Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, S. (2010). Konsep jaminan sosial. *Jurnal Sosial & Budaya*, 5(2), 45-60.
- Setiawan, B., & Usman, S. (2017). Sejarah dan perkembangan sistem jaminan sosial di Indonesia. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 10(2), 120-135.
- Sugiono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta: Bandung. Dja'an Sotori dan Aan Komariah. (2009). Pengantar Penelitian dalam Pendidikan. Remaja Rosdakarya: Bandung. Moleong, Lexy J. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Syaodin N. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. Sanafiah Faisal. (1990). Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Soekanto, S. (2019). Penyuluhan dan Sosialisasi Program Jaminan Sosial. Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada.
- Nurhayati. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Program Jaminan Sosial. *Jurnal Sosial dan Kesejahteraan*, 10(2), 78-92.

Ahmad. (2020). Kesadaran Masyarakat tentang Perlindungan Sosial. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 15(1), 45-57.

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. (2015). *Peran Dinas Sosial dalam Implementasi Program Jaminan Sosial*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

LAMPIRAN



